

## **II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

### **A. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Tinjauan Ekonomi Pisang**

Pisang merupakan salah satu komoditas pertanian yang mempunyai peranan yang cukup penting dalam perekonomian diantaranya sebagai sumber pendapatan, konsumsi dalam negeri, penyedia lapangan kerja, dan penghasil devisa negara. Oleh karena itu, pisang berpotensi untuk dikembangkan. Pisang juga mempunyai peluang besar untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Potensi pasar dalam negeri berkembang dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan bertambahnya jumlah konsumsi. Selain itu, pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pendapatan perkapita akan mendorong permintaan pisang dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pasar dalam negeri memiliki prospek yang baik dalam pengembangan pisang.

Untuk pasar luar negeri menurut Direktorat Jenderal Hortikultura (2012), Indonesia merupakan negara produsen pisang nomor enam di dunia setelah India, Brazil, Filipina, Ekuador, dan China. Negara tujuan ekspor adalah Jepang, Singapura, Malaysia, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Australia, Amerika Serikat, Jerman dan Belanda. Untuk

wilayah Asia, penghasil terbesar pisang adalah India, kemudian Filipina, China dan Indonesia. Pesaing utama Indonesia berasal dari negara-negara Amerika Latin dan negara-negara Asia.

Menurut Badan Pusat Statistik Jakarta (2012), produksi pisang Indonesia tahun 2011 sebesar 5,79 juta ton, tetapi volume ekspor pisang segar hanya sebesar 0,03 persen dari total produksi pisang Indonesia, sedangkan konsumsi pisang dunia sebesar 2,25 juta ton. Kecilnya volume ekspor ini disebabkan karena Indonesia hanya mengekspor jenis pisang cavendis yang sangat kecil produksinya. Sedangkan sebagian besar produksi pisang Indonesia terdiri dari berbagai jenis pisang lokal, bukan mengkhususkan jenis pisang cavendis yang umumnya disukai negara-negara pengimpor pisang. Kondisi seperti ini merupakan suatu peluang dan tantangan bagi Indonesia untuk mengembangkan dan memproduksi pisang yang disukai negara-negara importir. Selain itu, perlu digalakkan promosi untuk memperkenalkan berbagai jenis pisang Indonesia kepada konsumen dunia.

Sentra produksi pisang di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Daerah penghasil pisang di Jawa Barat meliputi Sukabumi, Cianjur, Bogor, Purwakarta, dan Serang. Jawa Tengah meliputi Demak, Pati, Banyumas, Sidorejo, Kesugihan, Kutosari, Pringsurat, dan Pemasang. Jawa Timur meliputi Banyuwangi dan Malang. Sumatera Utara meliputi Padang Sidempuan, Natal,

Samosir, dan Tarutung. Sumatera Barat meliputi Sungayang, Baso, dan Pasaman. Sumatera Selatan meliputi Tebing Tinggi, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, dan Baturaja. Lampung meliputi Kayu Agung dan Pesawaran (Direktorat Jenderal Hortikultura, 2012).

Kebijakan harga pisang selama ini diserahkan kepada mekanisme pasar. Rantai perdagangan pisang dalam usaha kecil yang dimulai dari petani menjual ke pengumpul kemudian ke pedagang mempunyai harga yang sangat bervariasi, tergantung pada varietas pisang. Untuk perkebunan skala besar, pengusaha dari kebun langsung ke pasar ritel dan sisanya yang bermutu rendah dilempar ke pasar tradisional.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2012), luas areal tanaman pisang di Provinsi Lampung sebesar 11.558,71 ha atau hampir 3,10 persen dari luas wilayah Provinsi Lampung yang mencapai 35.288,35 ha dan konsumsi pisang dalam negeri yang terus meningkat merupakan daya dukung untuk dikembangkannya komoditas pisang di Provinsi Lampung. Luas areal terbesar tanaman pisang di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Pesawaran (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, 2012) sehingga Kabupaten Pesawaran mempunyai peluang paling besar untuk dikembangkan komoditas pisang.

## 2. Tinjauan Agronomis Tanaman Pisang Ambon

Pisang adalah tanaman yang berasal dari kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tanaman ini menyebar ke Afrika (Madagaskar), Amerika Selatan dan Tengah (Soenarjono, 1998). Menurut Rismunandar (1990) tanaman pisang tumbuh dengan baik pada iklim tropis basah, lembab dan panas, namun pisang masih dapat tumbuh di daerah subtropis. Pada kondisi tanpa air, pisang masih dapat tumbuh karena air disuplai dari batangnya. Curah hujan optimal adalah 1.520-3.800 mm/tahun dengan 2 bulan kering. Pisang dapat tumbuh baik di tanah yang mengandung berhumus. Tanaman ini toleran akan ketinggian dan kekeringan. Di Indonesia umumnya tumbuh di dataran rendah sampai pegunungan setinggi 2.000 m dpl.

Tanaman pisang ambon dalam taksonomi tumbuhan diklasifikasikan menurut Suyanti dan Supriyadi (2008) adalah sebagai berikut :

Kingdom : *Plantae*  
 Divisi : *Magnoliphyta*  
 Sub Divisi : *Spermatophyta*  
 Kelas : *Liliopsida*  
 Sub Kelas : *Commelidinae*  
 Ordo : *Zingiberales*  
 Famili : *Musaceae*  
 Genus : *Musa*  
 Species : *Musa paradisiaca var. sapientum (L) Kunt.*

Menurut Stover dan Simmonads (1993), jenis pisang dibagi menjadi empat yaitu :

- a. Pisang yang dimakan buahnya tanpa dimasak yaitu *M. paradisiaca* var *Sapientum*, *M. nana* atau disebut juga *M. cavendishii*, *M.*

- sinensis*. Misalnya pisang ambon, susu, raja, cavendish, barangan dan mas.
- b. Pisang yang dimakan setelah buahnya dimasak yaitu *M. paradisiaca* forma *typica* atau disebut juga *M. paradisiaca normalis*. Misalnya pisang nangka, tanduk dan kepok.
  - c. Pisang berbiji yaitu *M. brachycarpa* yang di Indonesia dimanfaatkan daunnya. Misalnya pisang batu dan klutuk.
  - d. Pisang yang diambil seratnya misalnya pisang manila / abaca

Pisang ambon merupakan buah yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena mengandung senyawa yang disebut asam lemak rantai pendek, yang memelihara lapisan sel jaringan dari usus kecil dan meningkatkan kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi. Buah pisang ambon matang sangat efektif dalam mengurangi keparahan klinis dari penyakit diare dan banyak mengandung vitamin, mineral dan karbohidrat yang baik untuk dikonsumsi untuk tubuh

Pisang diperbanyak dengan cara vegetatif berupa tunas-tunas (anakan). Pengelolaan budidaya pisang memerlukan beberapa tindakan-tindakan yang harus dilakukan petani agar menghasilkan buah pisang yang berkualitas. Menurut Rismunandar (1990) tindakan-tindakan yang harus dilakukan petani dalam pengelolaan budidaya pisang antara lain :

- a. Pemilihan bibit, bibit yang baik berasal dari anakan yang berasal dari pohon yang berbuah baik dan sehat dengan tinggi anakan adalah 1-1,5 m dan lebar potongan umbi 15-20 cm. Tinggi bibit

akan berpengaruh terhadap produksi pisang (jumlah sisir dalam tiap tandan). Bibit anakan ada dua jenis yaitu anakan muda dan dewasa. Anakan dewasa lebih baik digunakan karena sudah mempunyai bakal bunga dan persediaan makanan di dalam bonggol sudah banyak. Penggunaan bibit yang berbentuk tombak (daun masih berbentuk seperti pedang, helai daun sempit) lebih diutamakan daripada bibit dengan daun yang lebar.

- b. Pengolahan media tanam antara lain dengan pembukaan lahan dilakukan dengan pembasmian gulma, rumput/ semak-semak, pengemburan tanah yg padat, pembuatan sengken dan pembuatan saluran pembuangan air.
- c. Pengaturan jarak tanam, jarak tanam disesuaikan dengan varietas pisang seperti pisang mas 2 x 2 m, pisang ambon/cavendish 3 x 3 m, pisang kepok 3,5 x 3 m.
- d. Pemeliharaan tanaman antara lain dengan penjarangan, penyiangan perempalan, pemupukan, pengairan/ penyiraman, pemberian mulsa, dan pemeliharaan buah.
- e. Pengendalian hama dan penyakit, pengendalian dilakukan dengan cara perlakuan dan pemberian dosis yang tepat.
- f. Pemanenan yang baik dan benar. Pada umur 1 tahun rata-rata pisang sudah berbuah. Penentuan waktu panen buah pisang yang tepat akan menghasilkan kualitas yang baik dimana penentuannya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat

kematangan dan kemasakan buah pisang. Selain itu, kualitas buah pisang yang baik ditentukan juga berdasarkan tingkat ketuaan buah dan penampakannya. Tingkat ketuaan buah diukur dari umurnya, sedangkan hasil penampakan tergantung pada penanganan pascapanennya. Penentuan waktu panen di Indonesia umumnya bukan berdasarkan tingkat ketuaan atau umur petiknya melainkan oleh kebutuhan ekonomi. Akibatnya banyak buah pisang yang dipanen belum sesuai tingkat ketuaannya sehingga pisang yang dihasilkan berkualitas rendah.

Keadaan buah pisang untuk dipanen dapat ditentukan dengan beberapa cara antara lain secara visual, fisik, dengan analisis kimia, dengan perhitungan, dan cara fisiologi. Cara visual dapat dilakukan dengan melihat warna kulit, ukuran, masih adanya sisa tangkai putik, adanya daun-daun tua dibagian luar yang kering, mengeringnya tubuh tanaman, bentuk buah tampak bulat berisi penuh, dan sudut penampang yang rata. Cara fisik dapat dilakukan dengan melihat dari mudahnya buah terlepas dari tangkai karena terlalu masak atau adanya absisi, ketegaran, dan berat jenis.

Standar kematangan dari pisang berbeda-beda menurut jenis pisang. Buah pisang biasanya tidak dibiarkan matang dipohon. Hal ini disebabkan karena buah pisang dibiarkan matang dipohon akan memiliki citarasa yang rendah dan mempunyai tendensi rontok dari

pohon sebelum atau sewaktu panen. Karena itu, pisang dipanen pada waktu masih hijau tapi sudah cukup tua.

Karena nilai ekonomi dan gizi pisang ambon yang tinggi serta proses pematangannya yang cepat maka diperlukan upaya untuk mengembangkan teknologi pasca panen yang tepat bagi pisang ambon. Dengan penanganan pasca panen yang tepat maka kualitas buah pisang ambon dapat ditingkatkan sehingga memiliki nilai jual yang baik. Pengembangan teknologi pasca panen seperti sistem pemanenan, penyortiran, penyimpanan, pengemasan dan pendistribusian memerlukan pengetahuan tentang berbagai aspek fisiologi yang terjadi selama proses pematangan buah pisang ambon.

Produktivitas tanaman pisang akan mencapai optimal apabila petani dalam melakukan usahataniya menerapkan keenam langkah-langkah budidaya pisang yang baik. Untuk mendukung bertambahnya keberhasilan usahatani pisang dibutuhkan kemitraan. Kemitraan dalam agribisnis merupakan suatu inovasi dan alternatif dalam mengatasi permasalahan dalam usahatani pisang seperti pemasaran.

### **3. Teori Kelembagaan**

#### **a. Pengertian Kelembagaan**

Kelembagaan dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai hal ikhwal tentang lembaga, baik lembaga eksekutif (pemerintah),



lembaga yudikatif (peradilan), lembaga legislatif (pembuat undang-undang), lembaga swasta maupun lembaga masyarakat. Hal penting tentang lembaga tersebut meliputi (Purwaka, 2008):

- 1) Landasan hukum kelembagaan yang terdiri dari seperangka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tujuan yang hendak dicapai, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi, serta kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga dalam rangka mencapai tujuan.
- 2) Tujuan yang hendak dicapai, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan landasan hukum yang rasional.
- 3) Keberadaan atau eksistensi dari kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum dengan argumentasi yang rasional.
- 4) Sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan argumentasi rasional.
- 5) Sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagai pelaksana kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum serta dengan argumentasi yang rasional.

- 6) Sumberdaya manusia memiliki kemampuan untuk menentukan tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga.
- 7) Mekanisme atau kerangka kerja dari pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan argumentasi yang rasional.
- 8) Jejaring kerja antar lembaga sebagaimana dapat dipahami melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan argumentasi yang rasional.
- 9) Hasil kerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan argumentasi yang rasional.

Hal penting tentang lembaga pertama sampai dengan keenam merupakan aspek statik (*static aspects*) dari kelembagaan yang disebut tata kelembagaan, sedangkan hal penting tentang lembaga ketujuh, kedelapan dan kesembilan merupakan aspek dinamik (*dynamic aspects*) dari kelembagaan yang disebut sebagai kerangka kerja atau mekanisme kelembagaan (Purwaka, 2008).

Struktur kelembagaan dari suatu organisasi kelembagaan terdiri dari dua substruktur utama, yaitu tata kelembagaan dan kerangka

kerja atau mekanisme kelembagaan. Masing-masing substruktur kelembagaan tersebut mengandung komponen-komponen kapasitas potensial (*potensial capacity*), daya dukung (*carrying capacity*) dan daya tampung (*absorptive capacity*) (Purwaka, 2008).

Mekanisme kelembagaan adalah tata kelembagaan dalam keadaan bekerja atau bergerak. Oleh karena itu mekanisme kelembagaan bersifat dinamis, sedang tata kelembagaan bersifat statis. Tata kelembagaan terdiri dari (Purwaka 2008):

- 1) Kapasitas potensial (*potensial capacity*), yaitu kemampuan potensial dari tata kelembagaan yang harus dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Daya dukung (*carrying capacity*), yaitu kemampuan tata kelembagaan untuk mendukung suatu aktivitas tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Daya dukung kelembagaan meliputi:
  - a) Upaya penafsiran dan penalaran terhadap uraian tugas pokok dan fungsi, dan landasan hukum kelembagaan yang berlaku, serta usaha pemberian argumentasi yang rasional terhadap hasil penafsiran dan penalaran tersebut.
  - b) Penempatan sejumlah sumberdaya manusia sesuai dengan kualifikasi berdasarkan hasil penafsiran, penalaran dan pemberian argumentasi yang rasional.

- c) Penempatan sejumlah sumberdaya buatan sesuai dengan kualifikasi berdasarkan hasil penafsiran, penalaran dan pemberian argumentasi yang rasional.
  - d) Pemberian beban tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kapasitas terpasang atau kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya buatan yang ditempatkan, serta tujuan yang ingin dicapai.
- 3) Daya tampung (*absorptive capacity*), yaitu kemampuan menyerap dan atau mengantisipasi setiap perubahan lingkungan yang terjadi tanpa harus mengubah jati diri kelembagaan yang sudah ada. Daya tampung disebut juga daya lentur kelembagaan meliputi:
- a) Upaya penafsiran dan penalaran terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, serta pemberian argumentasi yang rasional terhadap hasil penafsiran dan penalaran tersebut.
  - b) Upaya penyerasian, penyelarasan dan penyesuaian antara kondisi kelembagaan yang ada (*existing condition*) dan perubahan lingkungan kelembagaan.

Menurut Purwaka (2008) kapasitas yang harus ada dalam tata kelembagaan harus dituangkan dalam wujud sebagai berikut:

- 1) Visi, misi, tujuan dan objek.
- 2) Bentuk lembaga.
- 3) Struktur organisasi.
- 4) Uraian tugas pokok dan fungsi.

- 5) Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang diperlukan.
- 6) Kualitas dan kuantitas sumberdaya buatan yang diperlukan.

## **b. Ekonomi Kelembagaan**

Ekonomi kelembagaan (*Institutional Economics*) adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengaruh dan peranan institusi formal dan informal terhadap kinerja ekonomi, baik pada tataran makro maupun tataran mikro. Dalam perkembangannya, terdapat dua macam Ekonomi Kelembagaan yakni Ekonomi Kelembagaan Lama (*Old Institutional Economics*) dan Ekonomi Kelembagaan Baru (*New Institutional Economics*).

Para tokoh ekonomi kelembagaan lama mengkritik keras aliran neoklasik karena:

- 1) Neoklasik mengabaikan institusi dan oleh karena itu mengabaikan relevansi dan arti penting dari kendala – kendala non anggaran (*nonbudgetary constraints*).
- 2) Penekanan yang berlebihan kepada rasionalitas pengambilan keputusan (*rational-maximizing self-seeking behaviour of individuals*).
- 3) Konsentrasi yang berlebihan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) serta bersifat statis.
- 4) Penolakan neoklasik terhadap preferensi yang dapat berubah atau perilaku adalah pengulangan atau kebiasaan (Nabli dan Nugent, 1989 dalam Arsyad, 2010).

Sementara itu, ekonomi kelembagaan baru mencoba untuk menawarkan ekonomi lengkap dengan teori dan institusinya (Nabli dan Nugent, 1989 dalam Arsyad, 2010). Ekonomi kelembagaan baru menekankan pentingnya institusi, tetapi masih menggunakan landasan analisis ekonomi neoklasik. Beberapa asumsi ekonomi neoklasik masih digunakan, tetapi asumsi tentang rasionalitas dan adanya informasi sempurna (sehingga tidak ada biaya transaksi) ditentang oleh ekonomi kelembagaan baru.

Menurut ekonomi kelembagaan baru, institusi digunakan sebagai pendorong bekerjanya sistem pasar. Arti penting dari ekonomi kelembagaan baru adalah:

- 1) Ekonomi kelembagaan baru merupakan seperangkat teori yang dibangun di atas landasan ekonomi neoklasik, tetapi ekonomi kelembagaan baru mampu menjawab bahkan mengungkapkan permasalahan yang selama ini tidak mampu dijawab oleh ekonomi neoklasik. salah satu permasalahan tersebut adalah eksistensi sebuah perusahaan sebagai sebuah organisasi administratif dan keuangan. Ekonomi kelembagaan baru merupakan sebuah paradigma baru di dalam mempelajari, memahami, mengkaji atau bahkan menelaah ilmu ekonomi.
- 2) Ekonomi kelembagaan baru begitu penting dan bermakna di dalam konteks kebijakan ekonomi sejak dekade 1990-an, karena ekonomi kelembagaan baru berhasil mematahkan dominasi superioritas mekanisme pasar. Ekonomi kelembagaan baru telah memposisikan dirinya sebagai pembangun teori kelembagaan non-pasar (*non-market*

*institutions*). Ekonomi kelembagaan baru telah mengeksplorasi faktor – faktor non-ekonomi, seperti hak kepemilikan, hukum kontrak dan lain sebagainya sebagai satu jalan untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failure*). Menurut ekonomi kelembagaan baru, adanya informasi yang tidak sempurna, eksternalitas dan fenomena *free-riders* di dalam barang barang publik dinilai sebagai sumber utama kegagalan pasar, sehingga kehadiran institusi non-pasar mutlak diperlukan.

- 3) Ketika studi-studi pembangunan memerlukan satu landasan teoritis, ekonomi kelembagaan baru mampu memberikan solusinya.

### c. Ciri-ciri Kelembagaan

Suatu kelembagaan dicirikan oleh tiga komponen utama yaitu: 1) hak-hak kepemilikan (*property rights*) berupa hak atas benda, materi maupun non materi; 2) batas yurisdiksi (*jurisdictional boundary*); dan 3) aturan representasi (*rules of representation*) (Shaffer dan Schmid dalam Pakpahan, 1989). Dengan demikian, perubahan kelembagaan dicirikan oleh perubahan satu atau lebih unsur-unsur kelembagaan.

Hak-hak kepemilikan (*property rights*) mengandung pengertian tentang hak dan kewajiban yang didefinisikan dan diatur oleh hukum adat dan tradisi atau konsensus yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumber daya, situasi atau kondisi. Pernyataan terhadap hak milik memerlukan pengesahan dari

masyarakat dimana ia berada. Implikasi dari hal tersebut adalah; 1) hak seseorang adalah kewajiban orang lain; dan 2) hak yang dicerminkan oleh kepemilikan (*owner ship*) adalah sumber kekuatan untuk akses dan kontrol terhadap sumberdaya. *Property rights* individu atas suatu asset terdiri atas hak atau kekuasaan untuk mengkonsumsi, mendapatkan dan melakukan hak-haknya atas aset (Barzel dalam Basuni, 2003).

Batas yurisdiksi (*jurisdictional boundary*) menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam suatu masyarakat. Konsep batas yurisdiksi berarti batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh suatu lembaga, atau mengandung makna kedua-duanya sehingga mengandung makna bagaimana batas yurisdiksi berperan dalam mengatur lokasi sumberdaya.

Perubahan batas yurisdiksi di pengaruhi oleh empat faktor antara lain:

- 1) Perasaan sebagai suatu masyarakat (*sense of community*). Perasaan sebagai suatu masyarakat menentukan siapa yang termasuk dalam masyarakat dan yang tidak. Hal ini berkaitan dengan konsep jarak sosial yang menentukan komitmen yang dimiliki oleh suatu masyarakat terhadap suatu kebijaksanaan.
- 2) Eksternalitas, merupakan dampak yang diterima pihak tertentu akibat tindakan pihak lain. Perubahan atas batas yurisdiksi akan merubah struktur eksternalitas yang akhirnya merubah siapa menanggung apa.
- 3) Homogenitas, berkaitan dengan preferensi masyarakat yang merefleksikan permintaan terhadap barang dan jasa.
- 4) Skala ekonomi, menunjukan situasi dimana biaya per satuan terus menurun apabila output di tingkatkan. Batas yurisdiksi yang sesuai



akan menghasilkan ongkos per satuan yang lebih rendah di bandingkan dengan alternatif batas yurisdiksi lainnya.

Aturan representasi (*rules of representation*) merupakan perangkat aturan yang menentukan mekanisme pengambilan keputusan organisasi. Proses pengambilan keputusan dalam organisasi, terdapat dua jenis ongkos yang mendasari keputusan yaitu : 1) ongkos membuat keputusan sebagai produk dari partisipasi dalam membuat keputusan; dan 2) ongkos eksternal yang ditanggung oleh seseorang atau sebuah organisasi sebagai akibat keputusan organisasi tersebut. Aturan representasi mengatur siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Konsep ini menentukan jenis keputusan yang dibuat, sehingga aturan representasi menentukan alokasi dan distribusi sumberdaya.

#### **4. Kemitraan**

##### **a. Pengertian Kemitraan**

Kemitraan berasal dari kata mitra yang artinya teman. Kemitraan sebagai alat penghubung antara usaha kecil dengan usaha menengah/ usaha besar atau antara petani dengan perusahaan/industri karena adanya saling membutuhkan untuk mencapai tujuan yaitu mendapatkan keuntungan diantara kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu.

Kemitraan dapat dijelaskan secara ekonomi sebagai berikut :

- 1) Esensi kemitraan terletak pada kontribusi bersama, untuk tujuan kegiatan ekonomi, baik berupa tenaga (*labour*) maupun benda (*property*) atau keduanya dengan pengendaliannya secara bersama-sama dan pembagian keuntungan dan kerugian didistribusikan diantara mitra (Burns, 1966).
- 2) *Partnership* adalah suatu persekutuan dari dua orang atau lebih sebagai pemilik bersama yang menjalankan suatu bisnis mencari keuntungan (Winardi, 1977).
- 3) Kemitraan adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan dalam suatu persekutuan dua orang atau lebih untuk mencari keuntungan (Spencer, 1977).
- 4) Kemitraan adalah keuntungan-keuntungan yang diperoleh maupun pertanggungjawaban yang harus dipikul atas hutang -hutang perusahaan secara bersama-sama oleh pemilik perusahaan dalam suatu kegiatan usaha (Mc Eachern, 1988).

Menurut Glover dan Kusterer (1990), kemitraan merupakan suatu rangkaian aktivitas antara perusahaan besar dan kecil dalam bentuk “*contract farming*” yang kompleks. Dalam sistem ini melalui perjanjian/kontrak perusahaan mendapat produk dengan membeli dari petani pada beberapa kondisi penjualan dan perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan bantuan teknik dan jasa pelayanan.

Kemitraan mengandung arti lain yaitu adanya hubungan kerja sama yang dilandasi prinsip saling membutuhkan, menghidupi, memperkuat, dan menguntungkan antar badan usaha yang bersinergis bersifat sukarela yang menghasilkan *positive sum game* atau *win-win solution*. Semua pihak yang ikut dalam kemitraan harus merasakan keuntungan dan manfaat yang diperoleh dari kemitraan (Kartasasmita, 1996), sedangkan Hafsah (2000), mengartikan kemitraan adalah suatu strategi bisnis untuk memperoleh keuntungan/manfaat yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi berdasarkan pada kesepakatan dalam jangka waktu tertentu.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemitraan merupakan kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar dalam hubungan produksi sampai pemasaran disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan maupun mempertanggungjawabkan atas hutang -hutang secara bersama-sama dengan kesepakatan tertulis maupun lisan dalam jangka waktu tertentu. Dari makna yang terkandung dalam kemitraan tersebut seyogyanya kemitraan dapat membantu petani atau usaha kecil .

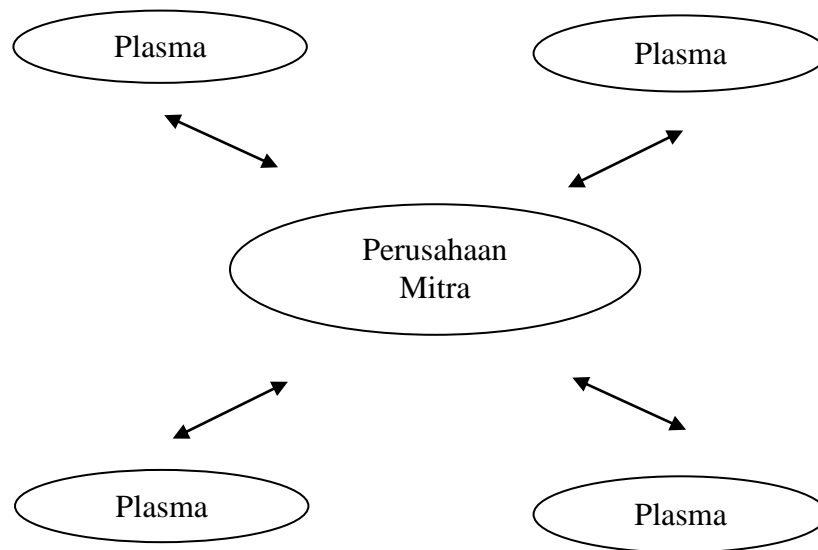
## **b. Pola Kemitraan**

Menurut Direktorat Pengembangan Usaha, Departemen Pertanian (2002), pola kemitraan yang banyak dilaksanakan di Indonesia yaitu :

### 1) Inti-Plasma

Merupakan hubungan antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra, perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma. Syarat-syarat untuk kelompok mitra yaitu : (a) berperan sebagai plasma, (b) mengelola seluruh usaha budidaya sampai usaha panen, (c) hasil produksi panen dijual kepada perusahaan mitra, dan (d) memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

Di sisi lain syarat-syarat perusahaan mitra yaitu : (a) berperan sebagai perusahaan inti, (b) menampung hasil produksi, (c) membeli hasil produksi, (d) kelompok mitra diberi bimbingan teknis dan pembinaan manajemen, (e) memberi pelayanan kepada kelompok mitra berupa permodalan/kredit, saprodi, dan teknologi, (f) mempunyai usaha budidaya pertanian/memproduksi kebutuhan perusahaan, dan (g) menyediakan lahan.



Gambar 1. Skema pola kemitraan inti plasma

Sumber : Direktorat Jenderal Pengembangan Usaha (2002)

Kelebihan dari pola inti plasma adalah:

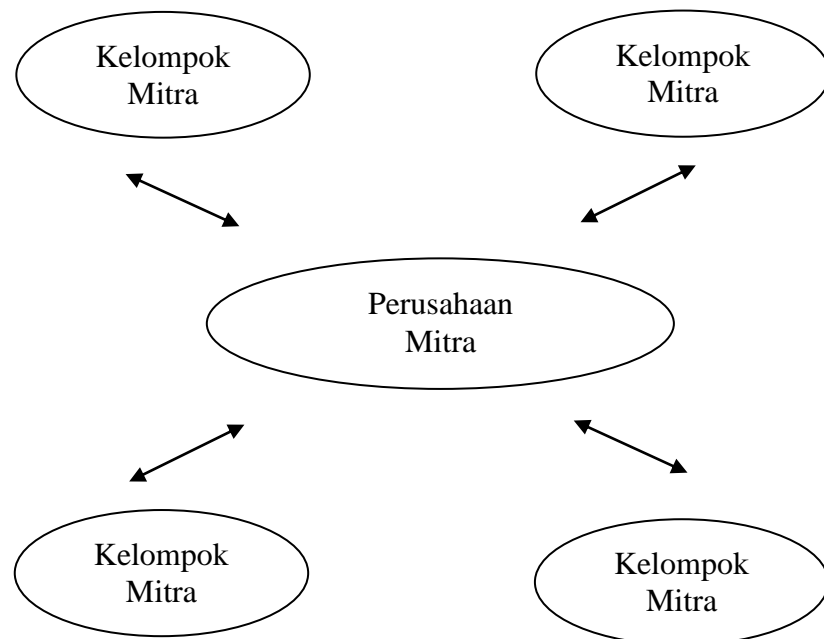
- a) Tercipta saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan,
- b) Tercipta peningkatan usaha, dan
- c) Dapat mendorong perkembangan ekonomi.

Kelemahan dari pola inti plasma adalah :

- a) Pihak plasma masih kurang memahami hak dan kewajibannya sehingga kesepakatan yang telah ditetapkan berjalan kurang lancar,
- b) Komitmen perusahaan inti masih lemah dalam memenuhi fungsi dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang diharapkan oleh plasma.

## 2) Subkontrak

Merupakan hubungan kemitraan untuk memproduksi bahan/komponen yang dibutuhkan perusahaan mitra yang dilakukan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Syarat-syarat kelompok mitra diantaranya: (a) memproduksi kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian komponen produksinya, (b) menyediakan tenaga kerja, dan (c) membuat kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga serta waktu.



Gambar 2. Skema pola kemitraan subkontrak

Sumber : Direktorat Jenderal Pengembangan Usaha (2002)

Di sisi lain syarat-syarat perusahaan mitra yaitu : (a) menampung dan membeli komponen produksi perusahaan yang dihasilkan oleh kelompok mitra, (b) menyediakan bahan baku/modal kerja, dan (c) melakukan kontrol kualitas produksi.

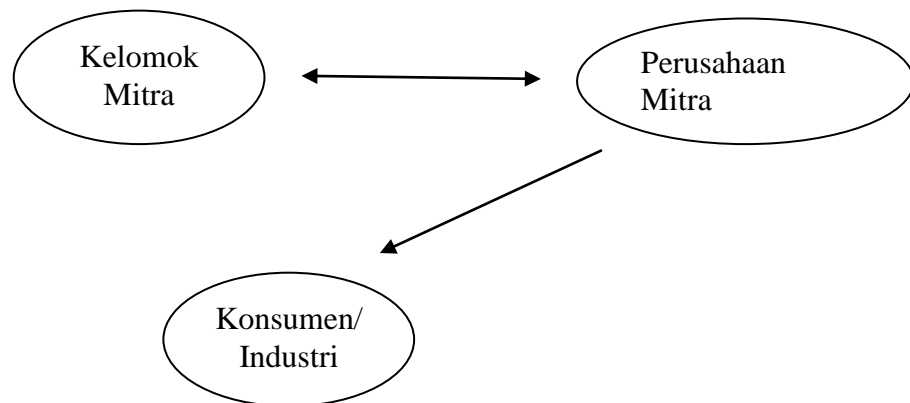
Kelebihan dari pola subkontrak adalah ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang mencakup volume, harga, mutu dan waktu kondusif bagi terciptanya alih teknologi, modal, keterampilan, dan produktivitas, serta terjaminnya pemasaran produk pada kelompok mitra.

Kelemahan dari pola subkontrak adalah :

- a) Hubungan subkontrak yang terjalin semakin lama cenderung mengisolasi produsen kecil dan mengarah ke monopoli atau monopsoni, terutama dalam penyediaan bahan baku serta dalam hal pemasaran.
- b) Berkurangnya nilai-nilai kemitraan antara kedua belah pihak. Perasaan saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling menghidupi berubah menjadi penekanan terhadap harga input yang tinggi atau pembelian produk dengan harga rendah.
- c) Kontrol kualitas produk ketat, tetapi tidak diimbangi dengan Sistem pembayaran yang tepat. Dalam kondisi ini, pembayaran produk perusahaan inti sering terlambat bahkan cenderung dilakukan secara konsinyasi. Disamping itu, timbul gejala eksploitasi tenaga kerja untuk mengejar target produksi.

### 3) Dagang Umum

Merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra untuk memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra. Syarat-syarat kelompok mitra yaitu memasok kebutuhan yang di perlukan perusahaan mitra. Syarat-syarat perusahaan mitra yaitu memasarkan hasil produksi kelompok mitra.



Gambar 3. Skema Pola Kemitraan Dagang Umum

Sumber : Direktorat Jenderal Pengembangan Usaha (2002)

Kelebihan dari pola dagang umum :

Pada dasarnya pola kemitraan ini adalah hubungan jual beli sehingga diperlukan struktur pendanaan yang kuat dari pihak yang bermitra, baik perusahaan mitra maupun kelompok mitra.

Keuntungan dalam pola kemitraan ini berasal dari margin harga dan jaminan harga produk yang diperjualbelikan, serta kualitas produk sesuai dengan kesepakatan pihak yang bermitra.

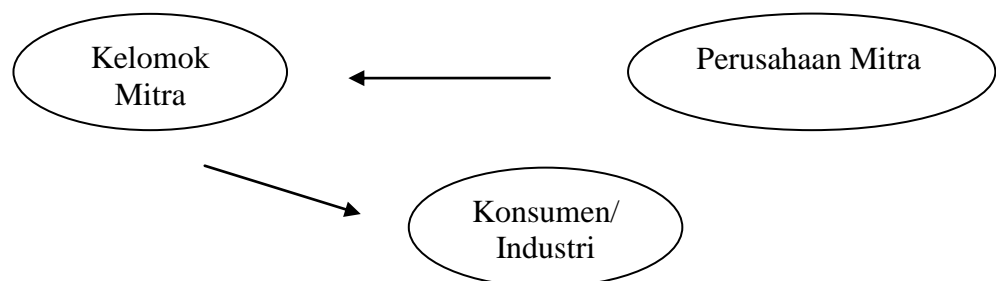


Kelemahan dari pola dagang umum adalah :

- a) Dalam prakteknya, harga dan volume produknya sering ditentukan secara sepihak oleh pengusaha mitra sehingga merugikan pihak kelompok mitra.
- b) Sistem perdagangan seringkali ditemukan berubah menjadi bentuk konsinyasi. Dalam sistem ini, pembayaran barang-barang pada kelompok mitra tertunda sehingga beban modal pemasaran produk harus ditanggung oleh kelompok mitra. Kondisi seperti ini sangat merugikan perputaran uang pada Kelompok mitra yang memiliki keterbatasan permodalan.

#### 4) Keagenan

Merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, dimana kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan mitra. Syarat-syarat kelompok mitra yaitu mendapatkan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra. Namun perusahaan mitra tidak mempunyai syarat.



Gambar 4. Skema Pola Kemitraan Keagenan

Sumber : Direktorat Jenderal Pengembangan Usaha (2002)

Kelebihan dari pola keagenan adalah :

Pola ini memungkinkan dilaksanakan oleh para pengusaha kecil yang kurang kuat modalnya, karena biasanya menggunakan sistem mirip konsinyasi. Berbeda dengan pola dagang umum yang justru perusahaan besarlah yang kadang-kadang lebih banyak mengeruk keuntungan dan kelompok mitra harus bermodal kuat.

Kelemahan dari pola keagenan adalah :

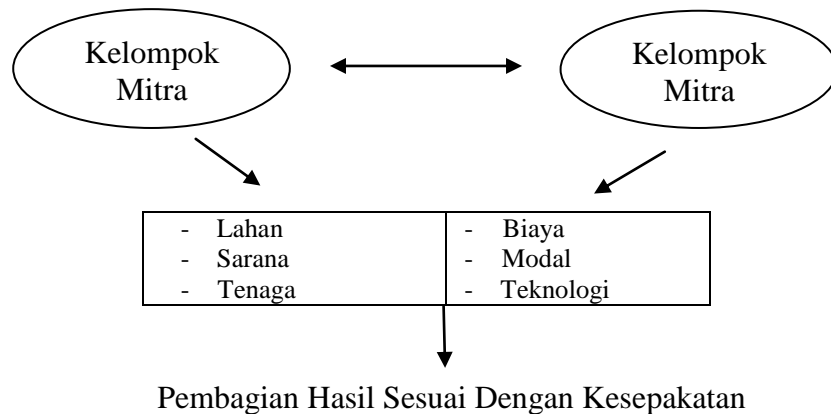
- a) Usaha kecil mitra menetapkan harga produk secara sepihak sehingga harganya menjadi tinggi di tingkat konsumen.
- b) Usaha kecil sering memasarkan produk dari beberapa mitra usaha saja sehingga kurang mampu membaca segmen pasar dan tidak memenuhi target.

#### 5) Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)

Merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian. Syarat kelompok mitra pada pola ini yakni menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja. Sedangkan syarat perusahaan mitra yaitu menyediakan biaya, modal, dan teknologi untuk mengusahakan atau membudidayakan komoditi pertanian.

Kelebihan dari pola KOA adalah :

Sama dengan keunggulan sistem inti plasma. Pola KOA ini paling banyak ditemukan pada masyarakat pedesaan, antara usaha kecil di desa dengan usaha rumah tangga dalam bentuk sistem bagi hasil.



Gambar 5. Skema Pola Kemitraan Operasional Agribisnis (KOA)

Sumber : Direktorat Jenderal Pengembangan Usaha (2002)

Kelemahan dari pola KOA adalah :

- a) Pengambilan untung oleh perusahaan mitra yang menangani aspek pemasaran dan pengolahan produk terlalu besar sehingga dirasakan kurang adil oleh kelompok usaha kecilnya.
  - b) Perusahaan mitra cenderung monopsoni, sehingga memperkecil Keuntungan yang diperoleh pengusaha kecil mitranya.
  - c) Belum ada pihak ketiga yang berperan efektif dalam memecahkan masalah.
- 6) Pola Lainnya Seperti Pola Kemitraan (Penyertaan) Saham
- Pola kemitraan ini merupakan penyertaan modal antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar. Penyertaan modal usaha

kecil dimulai sekurang-kurangnya 20 persen dari seluruh modal saham perusahaan yang baru dibentuk dan ditingkatkan secara bertahap sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan menengah atau usaha besar ataupun kemitraan yang dilakukan antara petani dengan perusahaan sebaiknya dilakukan dengan disertai pembinaan baik dalam hal sumberdaya manusia, permodalan, pengelolaan, teknologi, dan pemasaran. Pembinaan perusahaan kepada mitranya memungkinkan akan terjadinya pengembangan kemitraan menjadi lebih baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 26 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan bahwa kemitraan dilaksanakan dengan pola yaitu inti-plasma, sub-kontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, dan bentuk-bentuk kemitraan seperti bagi hasil, kerjasama operasional, dan usaha patungan (*joint venture*) yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

1. Pola inti-plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai plasma. Sebagai plasma bersedia dalam hal :
  - a. Penyediaan dan penyiapan lahan.
  - b. Penyediaan sarana produksi.
  - c. Pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha.

- d. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan.
  - e. Pembiayaan.
  - f. Pemasaran.
  - g. Penjaminan.
  - h. Pemberian informasi.
  - i. Pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.
2. Pola subkontrak adalah hubungan kemitraan untuk memproduksi barang atau jasa, usaha besar memberikan dukungan berupa :
    - a. Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan komponennya.
    - b. Kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar.
    - c. Bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen.
    - d. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan.
    - e. Pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak.
    - f. Upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.
  3. Pola waralaba adalah hubungan kemitraan dimana usaha besar memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki kemampuan. Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan bahan

hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba. Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

4. Pola perdagangan umum adalah kemitraan yang dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha mikro, kecil dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi usaha kecil atau usaha mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan. Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.
5. Pola distribusi dan keagenan adalah kemitraan yang dilakukan usaha besar atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro atau usaha kecil.
6. Bentuk-bentuk kemitraan lainnya diatur dalam peraturan peundang-undangan.

### **c. Tujuan dan Manfaat Kemitraan**

Pada dasarnya tujuan kemitraan adalah saling menguntungkan yang proporsional. Menurut Hafsah (1999) tujuan yang ingin dicapai dalam

kemitraan adalah : (1) meningkatkan pendapatan, (2) meningkatkan nilai tambah, (3) meningkatkan pemerataan, pemberdayaan usaha kecil, (4) meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan dan nasional, (5) meningkatkan lapangan kerja, dan (6) meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Manfaat yang diperoleh dari kemitraan menurut (Hafsah, 1999) antara lain adalah :

1) Produktivitas

Bagi perusahaan produktivitas didapat dengan mengoperasikan kapasitas pabrik secara *full capacity* tanpa perlu lahan dan pekerja lapangan, karena biaya untuk keperluan tersebut ditanggung oleh petani. Sedangkan bagi petani, peningkatan produktivitas didapat dengan menambah input baik kualitas maupun kuantitasnya dalam jumlah tertentu yang diperoleh dari perusahaan.

2) Efisiensi

Perusahaan dapat mencapai efisiensi dengan menghemat tenaga kerja yang dimiliki oleh petani. Sebaliknya bagi petani dapat menghemat waktu produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang disediakan oleh perusahaan.

3) Jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas

Kualitas, kuantitas dan kontinuitas dapat meningkatkan keberlangsungan kemitraan karena menjamin keuntungan perusahaan.

#### 4) Resiko

Resiko yang timbul dalam hubungan kemitraan akan ditanggung bersama, artinya dapat mengurangi beban resiko masing-masing pihak yang bermitra. Menurut Rustiani et al (1997) resiko yang dialihkan perusahaan ke petani adalah (1) resiko kegagalan produksi, (2) resiko kegagalan memenuhi kapasitas produksi, (3) resiko investasi akan tanah, (4) resiko akibat pengelolaan lahan usaha luas, dan (5) resiko konflik perburuhan. Sedangkan resiko yang dialihkan petani ke perusahaan antara lain : (1) resiko kegagalan pemasaran produk hasil pertanian, (2) resiko fluktuasi harga produk, dan (3) resiko kesulitan memperoleh input/ sumber daya produksi.

#### 5) Sosial

Kemitraan dapat memberikan dampak sosial (*social bonofit*) yang cukup tinggi (Hafsah, 1999). Hal ini berarti gejolak kecemburuan sosial yang bisa berkembang akibat ketimpangan dapat dihindari melalui kemitraan yang dapat menumbuhkan persaudaraan antar pelaku ekonomi yang berbeda status.

#### 6) Ketahanan Ekonomi Nasional

Kemitraan merupakan kegiatan untuk membantu petani atau usaha kecil guna meningkatkan dan kesejahteraan sekaligus terciptanya pemerataan yang lebih baik, sehingga secara tidak langsung akan mengurangi timbulnya kesenjangan ekonomi antar pelaku yang



terlibat dalam kemitraan yang pada gilirannya mampu meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional.

**d. Kelebihan dan Kekurangan Kemitraan**

Dengan melakukan kemitraan banyak kelebihan yang didapat oleh kedua belah pihak yang bermitra baik oleh petani maupun oleh perusahaan. Kelebihan yang diperoleh dalam kemitraan antara lain produktivitas meningkat, keuntungan meningkat, terjaminnya ketersediaan bahan baku, pemasaran jelas dan apabila ada resiko ditanggung bersama sehingga memperkecil beban resiko petani maupun perusahaan.

Menurut Daryanto dan Oktaviani (2003), terdapat beberapa keuntungan yang didapat oleh perusahaan dengan melakukan kemitraan yaitu (1) ketersediaan bahan baku dapat terjamin, (2) pengontrolan terhadap proses produksi, kualitas produksi dan penanganan pascapanen dapat dilakukan, (3) dapat menjaga kestabilan harga, (4) dapat memperkenalkan dan mengembangkan suatu jenis/ varietas tanaman baru, (5) memungkinkan dapat diidentifikasi kebutuhan pelanggan yang khusus, (6) implikasi pengontrolan logistik yang lebih baik, dan (7) hubungan yang baik dengan konsumen atau pembeli.

Keuntungan yang bisa diperoleh petani yakni : (1) kestabilan harga, sehingga dapat menjamin penghasilan, (2) menghambat pergerakan tengkulak, (3) pengembangan benih baru, (4) penggunaan teknologi dan

keterampilan baru, (5) hubungan didasarkan pada kepercayaan yang saling menguntungkan, (6) pembayaran akan hasil terjamin, (7) perusahaan menyediakan penyuluhan tentang teknis budidaya yang baik dan benar, (8) praktek jual beli yang adil, (9) dapat memperoleh fasilitas kredit. Selain mempunyai kelebihan, dalam bermitra juga terdapat kekurangan-kekurangannya.

Kekurangan terjadi akibat dari permasalahan yang timbul.

Permasalahan yang timbul di pihak petani antara lain : (1) petani tidak memenuhi standart kualitas produk yang diinginkan perusahaan, (2) faktor alam yang dapat mengakibatkan kegagalan panen, seperti perubahan cuaca dan bencana alam, sedangkan di pihak perusahaan penyalahgunaan posisi yang menjadikan perusahaan lebih dominan dalam hubungan kemitraan ,sehingga dalam pelaksanaannya terkadang perusahaan tidak menepati janji. Untuk itu perjanjian yang dibuat harus jelas berdasarkan hukum dan dijabarkan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

#### **e. Kendala dalam Kemitraan**

Kendala dalam kemitraan dapat dibedakan menjadi kendala bagi pihak petani dan kendala yang dihadapi pihak perusahaan. Kendala yang dihadapi petani antara lain harga ditentukan secara sepihak oleh perusahaan, pengetahuan petani terbatas, informasi tidak tersebar secara merata, keberpihakan perusahaan terkadang tidak kepada petani dan

kurangnya petani mengetahui isi dari perjanjian yang disepakati atau *Memorandum of Understanding (MoU)*. MoU merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang dituangkan dalam bentuk dokumen hukum. Kendala bagi pihak perusahaan antara lain adalah kemampuan manajemen dan kemampuan dalam menyediakan dana. Perusahaan harus mampu menyediakan dana yang cukup besar sebelum memperoleh keuntungan dari kemitraan yang akan dilaksanakan, karena berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan usaha yang sedang berjalan, apabila tidak ada ketersediaan dana yang cukup maka kegiatan usaha akan terhenti di tengah jalan. Kemampuan manajemen perusahaan menyangkut keahlian para petugas lapangan untuk membina para petani mitra.

##### **5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Petani Melakukan Kemitraan**

Kemitraan merupakan suatu inovasi bagi petani. Menurut Mardikanto (1993), inovasi adalah suatu informasi, ide dan praktek-praktek baru yang belum banyak diketahui, diterima dan dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat dalam suatu wilayah tertentu untuk melaksanakan perubahan di bidang ekonomi, sosial budaya dan politik untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi petani melakukan kemitraan menurut Rachmawati (2008) adalah umur petani, jumlah anggota keluarga yang produktif, dan luas lahan. Peneliti lain Marliana (2008) menyimpulkan

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi petani melakukan kemitraan adalah pengalaman berusahatani, pendidikan terakhir dan produktivitas. Menurut Puspitawati (2004) faktor-faktor yang mempengaruhi petani melakukan kemitraan adalah harga benih, jumlah benih, total produksi, harga output, dan jumlah tenaga kerja luar keluarga.

Dari uraian yang telah disampaikan peneliti terdahulu dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam melakukan kemitraan antara lain adalah:

- a. Umur, semakin tua umur petani akan semakin sulit peluang menerima perubahan atau melakukan kemitraan.
- b. Pendidikan, semakin tinggi pendidikan seorang petani maka semakin besar peluang petani melakukan kemitraan.
- c. Jumlah anggota keluarga yang produktif, semakin banyak jumlah anggota keluarga yang produktif akan semakin besar peluang untuk melakukan kemitraan.
- d. Harga output/ produk, semakin tinggi harga komoditi yang ditawarkan perusahaan akan semakin besar minat petani untuk bermitra.
- e. Status lahan, status lahan yang digunakan petani untuk berusahatani akan mempengaruhi petani untuk melakukan kemitraan.

## **6. Pendapatan Usahatani**

Usahatani merupakan kegiatan seseorang atau sekumpulan orang untuk mengelola unsur-unsur produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal dan

manajemen dengan tujuan untuk memperoleh produksi di sektor pertanian pada suatu tempat tertentu (Mubyarto, 1999). Keberhasilan usahatani dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada dua faktor yang mempengaruhi usahatani yaitu faktor internal (faktor-faktor produksi yang dapat dikendalikan oleh petani) dan faktor eksternal (faktor-faktor produksi yang sulit untuk dikontrol oleh petani). Faktor intern meliputi lahan, tenaga kerja, jumlah keluarga petani, teknologi, modal, dan kemampuan petani mengalokasikan penerimaan keluarga. Faktor ekstern meliputi iklim/cuaca, tersedianya sarana transportasi dan komunikasi, input usahatani, aspek yang menyangkut pemasaran hasil, harga, sarana penyuluhan, dan fasilitas kredit.

Menurut Soeharjo dan Patong (1973) berusahatani merupakan kegiatan yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh produksi yang didapat dari penerimaan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan.

Penerimaan usahatani adalah hasil kali dari output yang dihasilkan dengan harga atau nilai produk yang dihasilkan, sedangkan biaya usahatani adalah semua korbanan yang dikeluarkan yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk dalam periode produksi. Selisih antara penerimaan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan merupakan pendapatan usahatani.

Pendapatan adalah penerimaan dari suatu hasil usaha yang telah dikurangi dengan hasil biaya – biaya selama proses produksi.

Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh petani dalam mengelola

usahatani dengan menggunakan lahan, tenaga kerja, dan modal (Hernanto, 1993). Keberhasilan usahatani dapat dilihat dari besarnya pendapatan usahatani yang diperoleh. Menurut Soeharjo dan Patong, (1973) analisis pendapatan usahatani mempunyai tujuan yaitu untuk menggambarkan keadaan usahatani pada saat sekarang dan keadaan yang akan datang dari suatu perencanaan dan tindakan.

Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh petani dalam mengelola usahatani dengan menggunakan lahan, tenaga kerja, dan modal. Dalam analisis pendapat usahatani diperlukan keadaan penerimaan dan keadaan pengeluaran dalam berusahatani pada jangka waktu tertentu. Penerimaan usahatani merupakan nilai produksi yang dihasilkan dari harga jual di tingkat petani. Pengeluaran adalah nilai penggunaan sarana produksi dan lainnya yang diperoleh dengan membeli, sehingga pengeluaran atau biaya berbentuk tunai.

Menurut Mubyarto (1999), biaya produksi dibagi menjadi dua bagian, yaitu biaya tetap dan biaya *variable*. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk input tetap, yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi yang dihasilkan. Yang tergolong ke dalam biaya tetap adalah sewa tanah, peralatan pertanian, pajak dan iuran irigasi. Biaya *variable* adalah biaya yang dikeluarkan untuk input *variable* yang jumlahnya tergantung dari jumlah yang ingin dihasilkan. Yang tergolong ke dalam biaya *variable* adalah biaya bibit, obat-obatan, pupuk dan tenaga kerja.

Biaya total meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya untuk sarana produksi yang dipakai dalam proses produksi yang tidak langsung mempengaruhi jumlah produksi dan sifat penggunaannya tidak habis terpakai dalam satu kali proses produksi. Biaya tetap antara lain meliputi pajak lahan, biaya penggunaan traktor dan lain-lain. Biaya variabel merupakan biaya untuk sarana produksi yang dipakai dalam proses produksi yang langsung mempengaruhi jumlah produksi dan sifat penggunaannya habis terpakai dalam satu kali proses produksi.

Analisis pendapatan sangat penting bagi petani dalam menjalankan usahatannya karena dapat memberikan bantuan dan kemudahan dalam mengukur tingkat keberhasilan usahatannya. Keberhasilan usahatani dapat diukur dari besarnya keuntungan atau pendapatan yang diperoleh petani. Besarnya keuntungan atau pendapatan yang diterima dapat dirumuskan (Soekartawi, 1995):

$$\pi = P_y \cdot Y - \sum_{i=1}^i P_{xi} \cdot X_i - BTT$$

Dimana :  $\pi$  : Pendapatan/ Keuntungan usahatani  
 $Y$  : Jumlah produksi  
 $P_y$  : Harga per satuan produksi  
 $X_i$  : Faktor produksi  
 $P_{xi}$  : Harga per satuan faktor produksi  
 $BTT$  : Biaya tetap total

Menurut Soekartawi at all (1986), pendapatan kotor usahatani (*gross farm income*) didefinisikan sebagai nilai produk total usahatani dalam

jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual.

Pengeluaran total usahatani (*total farm expenses*) didefinisikan sebagai nilai semua masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan di dalam produksi, tetapi tidak termasuk tenaga kerja tani. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan bersih usahatani (*net farm income*) merupakan selisih antara pendapatan kotor usahatani dengan pengeluaran total usahatani.

Dalam penelitian ini sangat diperlukan analisis pendapatan usahatani, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kemitraan dengan PT Mulia Raya terhadap tingkat pendapatan usahatani petani mitra dan non mitra pada usahatani pisang ambon.

## **7. Hasil Penelitian Terdahulu**

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.



Tabel 4. Penelitian terdahulu yang relevan

No	Nama Peneliti/ Jurnal/Tahun	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Safitri (2008) pada jurnal HABITAT Volume XIX No.2 (2008)	Pola kemitraan antara PT. Sewu Segar Nusantara dengan Gapoktan Prima Tani pisang mas kirana di Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang.	Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode acak sederhana ( <i>simple random sampling</i> ).  Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan Kuantitatif yakni analisis regresi linier berganda.	Pola kemitraan yang dilaksanakan adalah pola dagang umum. Kemitraan yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pisang mas kirana perusahaan. Sesuai dengan informasi dari pihak PT. Sewu Segar Nusantara, perusahaan menginginkan produk sebanyak 350 kardus (@ 11 kg). Dalam hal ini PT. Sewu Segar Nusantara berperan sebagai perusahaan mitra, dan Gapoktan Prima Tani berperan sebagai kelompok mitra. Hasil R/C rasio yang lebih dari 1 menunjukkan usahatani pisang mas kirana yang dilakukan oleh Gapoktan Prima Tani efisien dan menguntungkan.  Faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pendapatan Gapoktan Prima Tani pisang mas kirana adalah pendidikan, luas lahan, dan lama berusahatani.
2	Puspitawati (2004)	Analisis kemitraan antara PT.Pertani (Persero) dengan petani penangkar benih padi di Kabupaten Karawang Jawa Barat	Penelitian ini menganalisis kemitraan antara PT. Pertani dengan petani penangkar benih padi dengan menggunakan pendekatan model fungsi logit, analisis proses hirarki (AHP), dan analisis pendapatan usahatani (R/C ratio).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan yang dijalankan antara PT. Pertani dengan petani penangkar benih menunjukkan pola hubungan sub kontrak. Faktor-faktor yang memotivasi perusahaan melakukan kemitraan adalah permodalan, jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas, manajemen, dan penguasaan teknologi, pengalihan resiko, akses pasar, dan kebijakan pemerintah. Bagi petani mitra, faktor yang mempengaruhi peluang petani melakukan kemitraan adalah harga benih, jumlah benih, total produksi, harga

Tabel 4. Lanjutan

No	Nama Peneliti/ Jurnal/Tahun	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>output (gabah) dan curahan tenaga kerja luar keluarga.</p> <p>Manfaat kemitraan bagi petani mitra memberi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan petani non mitra. Melalui kemitraan, petani penangkar lebih efisien dalam pengelolaan usahatannya dan produktivitasnya lebih tinggi daripada petani non mitra.</p> <p>Adapun kendala yang dialami perusahaan selama menjalin kemitraan dengan petani penangkar benih antara lain keterbatasan ketersediaan dana, kapasitas manajemen dan keahlian, penguasaan pasar, dan petani yang lambat adopsi teknologi baru. Sedangkan kendala bagi petani penangkar meliputi keterlambatan pembayaran atas pembelian. hasil panen, pembatalan pembelian hasil panen secara sepihak, keterlambatan pengambilan gabah di sawah, dan keterlambatan pengiriman benih ke petani penangkar. PT. Pertanian menginginkan bentuk kemitraan inti-plasma untuk memenuhi kebutuhan benih bersertifikat.</p>
3	Purnaningsih (2006) pada Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia (2007)	Adopsi inovasi pola kemitraan agribisnis sayuran di Provinsi Jawa Barat.	Penelitian ini menggunakan metode kasus kolektif di lima perusahaan dan satu koperasi yang menerapkan pola kemitraan agribisnis. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik.	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan petani terhadap inovasi pola kemitraan agribisnis terjadi melalui interaksi antarpetugas atau pihak mitra dengan petani, kemudian menyebar melalui interaksi sesama petani dan keluarganya dalam suatu komunitas. Manfaat ekonomi yang diperoleh petani dari pola kemitraan adalah pendapatan yang lebih tinggi, harga yang lebih pasti, produktivitas lahan

Tabel 4. Lanjutan

No	Nama Peneliti/ Jurnal/Tahun	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>lebih tinggi, penyebaran tenaga kerja dan modal yang lebih tinggi, dan resiko usaha ditanggung bersama. Manfaat teknis yang diperoleh petani yaitu penggunaan teknologi yang lebih baik sehingga mutu produk menjadi lebih baik. Manfaat sosial yang diperoleh petani adalah ada kesinambungan kerjasama antara petani dan perusahaan, koperasi maupun pedagang pengumpul, serta pola kemitraan mempunyai kontribusi terhadap kelestarian lingkungan.</p>
4	Puspitasari (2003)	Kajian pelaksanaan kemitraan antara PT. Agro Inti Pratiwi (AIP) dengan petani ubi jalar di Desa Sindang Barang, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat	Sampel petani dibagi ke dalam kedua kelompok yaitu 30 petani mitra dan 30 petani non mitra yang diambil secara acak sederhana. Pelaksanaan kemitraan dianalisis secara deskriptif dan analisis dampak kemitraan dilakukan dengan melakukan analisis pendapatan usahatani, R/C rasio, B/C ratio dan uji T-Test.	<p>Hasil penelitian menunjukkan pola kemitraan yang diterapkan PT. Agro Inti Pratiwi (AIP) dengan petani mitra adalah pola Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA). Manfaat kemitraan bagi perusahaan adalah memenuhi kebutuhan bahan baku dan menjaga kontinuitas serta mengantisipasi lonjakan harga ubi jalar di pasaran. Perusahaan tidak harus mengelola budidaya usahatani ubi jalar. Manfaat bagi petani mitra antara lain membantu petani dalam pengadaan bibit ubi jalar, pinjaman modal, keterjaminan pasar, harga telah ditentukan oleh perusahaan sehingga resiko terjadinya penurunan harga saat panen raya dapat diminimalkan.</p> <p>Pendapatan usahatani ubi jalar petani mitra dan non mitra tidak berbeda nyata setelah dilakukan pengujian secara statistik dengan metode t-Test pada taraf kepercayaan 95%.</p>

Tabel 4. Lanjutan

No	Nama Peneliti/ Jurnal/Tahun	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
5	Mardiyah (2013)	Produksi dan perilaku petani terhadap risiko usahatani cabai merah di Kabupaten Tanggamus	Analisis yang digunakan adalah logistik regression.	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani cabai merah di Kabupaten Tanggamus yang menggunakan mulsa dan yang tidak menggunakan mulsa belum efisien secara teknis. Pendapatan usahatani yang menggunakan plastik mulsa lebih besar dibandingkan dengan yang tidak menggunakan plastik mulsa.</p> <p>Risiko usahatani yang menggunakan plastik mulsa lebih tinggi dibandingkan dengan risiko usahatani yang tidak menggunakan plastik mulsa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku petani terhadap risiko usahatani cabai merah yaitu tingkat pendidikan formal, pengalaman usahatani, dan luas lahan.</p>
6	Aspa (2013) pada Jurnal Kemandirian Agribisnis (2013)	Pola kemitraan Mandiri terhadap pendapatan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang	Pengambilan sampel sebanyak 72 petani di 10 Desa/kelurahan. Data dianalisa dengan menggunakan statistik korelasi product moment.	<p>Berdasarkan analisis data pendapatan petani dan pemodal dalam usaha tani bawang merah menunjukkan bahwa pola kemitraan yang diterapkan pada usaha tani bawang merah dapat memberikan pendapatan yang layak bagi petani dan pemodal mandiri.</p> <p>Pola kemitraan yang diterapkan ini sangat efektif karena dapat mengatasi kendala yang selama ini sangat dirasakan oleh para petani kita di Indonesia pada umumnya dan petani bawang merah di Kabupaten Enrekang yakni masalah kekurangan modal disisi lain kepercayaan pemodal untuk membiayai usaha tani bawang merah ini tidaklah sia sia karena pemodalpun dapat memperoleh keuntungan dari modal yang</p>

Tabel 4. Lanjutan

No	Nama Peneliti/ Jurnal/Tahun	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
				ditanamkan pada usahatani. Selama penelitian berlangsung tidak satupun petani bawang merah yang mengalami puso atau gagal panen dan semuanya memperoleh keuntungan walaupun berbeda beda karena berlaku hukum pasar yakni hukum permintaan dan pemasaran ( <i>supply and demand</i> ) tetapi secara umum baik petani maupun pemodal mandiri memperoleh keuntungan sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan dengan sistim pola kemitraan mandiri layak dan efektif diterapkan pada usaha tani bawang merah secara khusus dan usaha tani lainnya karena dapat mengatasi kendala modal yang selama ini dirasakan oleh petani.
7	Suyono (2006)	Pengaruh program kemitraan bagi pengembangan ekonomi lokal (KPEL) terhadap pendapatan petani budidaya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo	Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 dari 97 petani budidaya ulat sutera yang sudah berproduksi kokon. Data dikumpulkan melalui studi lapangan dan dianalisa dengan dua pendekatan yakni : analisis diskriptif dan analisis Uji Pangkat Tanda Wilcoxon.	Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi lokal yang bermuara kepada pemberantasan kemiskinan di daerah, bisa dilakukan dengan program Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL). Program ini selain dapat meningkatkan keterampilan petani budidaya ulat sutera sebagai penerima program juga mampu meningkatkan pendapatan petani budidaya ulat sutera yang ada di Kabupaten Wonosobo.
8	Hasyim (2009) pada Jurnal Sosioekonomika (2009)	Kajian model pengembangan agribisnis pisang ambon ( <i>Musacea. sp</i> ) untuk pembangunan pertanian perdesaan Peningkatan pendapatan petani studi kasus di Desa Way Ratay, Kecamatan	Data yang digunakan adalah data primer dari 3 responden pengepul pisang di Desa Way Ratay. Analisis yang digunakan adalah penyusunan model pengembangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pengembangan agribisnis pisang potensial dikembangkan dengan pendekatan pola petani, R/C ratio pengepul pisang sebesar 21,12%, pendapatan kotor sebesar Rp.600.000,00/hari atau Rp 201,6 juta/tahun

Tabel 4. Lanjutan

No	Nama Peneliti/ Jurnal/Tahun	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
		Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.	agribisnis pisang pola kemitraan, analisis R/C ratio pegepul, deskripsi prospek agribisnis pisang.	pegepul. Pada tahun 2006, peredaran uang tunai di perdesaan mencapai nilai Rp.164,978 milyar sedangkan pada tahun 2007 sedikit menurun menjadi Rp 122,648 milyar/tahun.
9	Hertanto (2009)	Kemitraan Usaha Ayam Ras Pedaging: Kajian Posisi Tawar dan Pendapatan	Sampel 30 peternak pola kemitraan dan 30 peternak pola non kemitraan secara acak. Data yang diperoleh dianalisis secara diskriptif, skoring, pendapatan dan titik impas.	Ayam ras pedaging pola kemitraan dilaksanakan dengan cara kerjasama antara PT. Surya Gemilang Pratama selaku mitra usaha inti dengan peternak selaku mitra usaha plasma. Mitra usaha inti memberikan kredit agro input berupa bibit, pakan dan obat - obatan dan dibayar peternak setelah panen. Peternak pola kemitraan sebagai pembudidaya. Sedangkan usaha ayam ras pedaging non kemitraan dilaksanakan secara mandiri oleh peternak tanpa kerjasama dengan pihak manapun.  Hasil analisis pendapatan bahwa pada skala usaha yang sama yaitu 1.000 ekor, pendapatan peternak kemitraan Rp. 3.284.939,00 sedangkan non kemitraan Rp 10.837.210,00. Hal ini berarti dampak kemitraan usaha ayam ras pedaging menurunkan pendapatan peternak.
10	Wibowo (2013) pada Jurnal Manajemen Agribisnis, Vol. 13, No. 1 (2013)	Pola Kemitraan Antara Petani Tebu Rakyat Kredit (TRK) Dan Mandiri (TRM) Dengan Pabrik Gula Modjopangoong Tulungagung	Responden sebanyak 134 orang yang terdiri dari petani tebu rakyat kredit (TRK) sebanyak 93 orang dan petani tebu rakyat mandiri (TRM) sebanyak 41 orang. Analisis yang dilakukan antara lain analisis deskriptif dan analisis kuantitatif.	Pola kemitraan yang terjalin antara petani tebu TRK dengan pabrik gula Modjopangoong mencakup pemberian modal usaha dan sarana produksi, pendampingan, pengawasan pada teknis budidaya tebu, pengolahan hasil dan bagi hasil.  Keuntungan yang diperoleh petani tebu TRK adalah sebesar Rp 34.271.800,-. Sedangkan keuntungan yang diperoleh petani tebu TRM

Tabel 4. Lanjutan

No	Nama Peneliti/ Jurnal/Tahun	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>adalah sebesar Rp 28.538.000,-. Sehingga dalam pola kemitraan ini petani tebu TRK memperoleh keuntungan yang lebih besar dibanding petani tebu TRM yaitu sebesar Rp 5.733.800,-</p> <p>Nilai B/C ratio untuk petani tebu TRK maupun petani tebu TRM bernilai &gt; 1, sehingga pola kemitraan usahatani tebu TRK maupun TRM dengan pabrik gula Modjopanggoong memperoleh keuntungan dan layak untuk diusahakan.</p>
11	Saptana (2004) pada Jurnal Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (2004)	Analisis Kelembagaan Kemitraan Usaha di Sentra Sentra Produksi Sayuran (Suatu Kajian Atas Kasus Kelembagaan Kemitraan Usaha di Bali, Sumatera Utara, dan Jawa Barat)	Analisis yang digunakan adalah analisis kelembagaan yang dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis kelembagaan difokuskan pada pola, aturan main ( <i>rule of the game</i> ) yang dijalankan serta pola interaksi antar lembaga yang bermitra.	<p>Kelembagaan kemitraan usaha komoditas sayuran yang eksis dan sedang berjalan di daerah sentra produksi sayuran antara lain adalah : Pola Dagang Umum, Pola Kontrak Pemasaran, Pola Inti-Plasma, Pola Pembinaan dan Kredit Bibit, Kerjasama dalam rangka pengembangan STA, dan Kerjasama dalam penyediaan modal KSU, LPD, <i>Credit Union</i> dan lembaga perbankan.</p> <p>Efektivitas kinerja kelembagaan kemitraan usaha komoditas sayuran sangat ditentukan oleh beberapa hal pokok : 1) Karakteristik komoditas sayuran terutama kemampuan daya simpan; 2) Komitmen antara pihak-pihak yang bermitra; 3) Keterbukaan (<i>transparancy</i>) antara pihak-pihak yang bermitra terutama dalam hal harga dan pembagian keuntungan; 4) Kemampuan petani mitra dalam menghasilkan produk sayuran yang dapat memenuhi jenis, jumlah, kualitas, dan kontinuitas sesuai permintaan pasar yang</p>

Tabel 4. Lanjutan

No	Nama Peneliti/ Jurnal/Tahun	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
				dikoordinasikan oleh perusahaan mitra; 5) Kemampuan menembus dan memperluas jaringan pasar oleh perusahaan mitra; dan 6) Kemampuan pendalaman industri pengolahan melalui diversifikasi produk oleh perusahaan mitra.
12	Palmarudi dan Kasim (2012) pada JITP Vol. 2 No.1 (2012)	Analisis Tingkat Kepuasan Peternak Dalam Pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging di Sulawesi Selatan : Studi Kasus di Kabupaten Maros	Sebanyak 58 orang peternak yang melaksanakan kemitraan usaha dipilih sebagai sampel berdasarkan metode <i>stratified random sampling</i> . Adapun alat analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis kepentingan kinerja ( <i>Importance-Performance Analysis</i> ).	Secara keseluruhan peternak cukup puas terhadap atribut-atribut dari dimensi kualitas layanan perusahaan inti dalam pelaksanaan kemitraan usaha peternakan ayam ras potong. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata tingkat kesesuaian sebesar 77.04 %, dimana nilai ini berada pada daerah cukup puas.
13	Juniardi (2008) pada Jurnal Sains Mahasiswa Pertanian Vol 1 No. 1 (2008)	Analisis Distribusi Pendapatan Petani Ubi Kayu Pola Kemitraan Dan Bukan Kemitraan Pada PT. Sari Pati Semudun Jaya Di Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak.	Untuk mengetahui perbandingan pendapatan usahatani ubi kayu antara petani pola kemitraan PT. Sari Pati Semudun Jaya dengan petani bukan kemitraan, digunakan uji statistik Uji-t menggunakan SPSS 17. Untuk mengetahui tingkat distribusi pendapatan keluarga digunakan rumus koefisien Gini atau <i>Gini Ratio</i> .	Rata-rata pendapatan usahatani ubi kayu petani pola kemitraan PT. Sari Pati Semudun Jaya (Rp. 5.200.757,-) lebih kecil dari rata-rata pendapatan usahatani ubi kayu petani bukan kemitraan (Rp. 7.215.092,-) hal ini dilihat dari Hasil uji statistik Independent Sampel t test terhadap perbandingan pendapatan usahatani ubi kayu pola kemitraan dan bukan kemitraan menunjukkan nilai t adalah sebesar -7,371 (sig < 0,05) sehingga dikatakan terdapat perbedaan yang antara perbandingan pendapatan usahatani ubi kayu petani pola kemitraan dan bukan kemitraan.  Nilai Gini ratio pada petani ubi kayu pola kemitraan adalah sebesar 0,1. Nilai <i>Gini ratio</i> petani ubi kayu bukan



Tabel 4. Lanjutan

No	Nama Peneliti/ Jurnal/Tahun	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
				kemitraan adalah sebesar 0,125 atau dibulatkan menjadi 0,1. Berdasarkan kriteria nilai koefisien Gini pendapatan keluarga petani ubi kayu dari kedua pola tersebut berada di wilayah kurang dari 0,3 yaitu tingkat ketimpangan rendah.
14	Lesmana (2011) pada EPP. Vol.8 No.2 (2011)	Hubungan Persepsi Dan Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Keputusan Petani Mengembangkan Pola Kemitraan Petani Plasma Mandiri Kelapa Sawit ( <i>Elaeis Guineensis</i> jacq.) Di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda	Untuk mengetahui persepsi petani, peneliti memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh responden dan skor yang diberikan berbeda untuk setiap jawaban yang tersedia.	Responden plasma mandiri memiliki persepsi positif sebesar 100%, dan 20% responden non plasma mandiri memiliki persepsi positif namun tidak mengembangkan pola kemitraan petani plasma mandiri karena adanya faktor-faktor sosial ekonomi responden yang tidak mendukung.  Hasil analisis Chi kuadrat ( $\chi^2$ ) menunjukkan bahwa $\chi^2$ hitung = 6,166 dan $\chi^2$ tabel (db, $\alpha = 0,05$ ) = 5,991 atau $\chi^2$ hitung = 6,166 $\geq$ $\chi^2$ tabel = 5,991 yang berarti bahwa terdapat hubungan antara persepsi dan faktor-faktor sosial ekonomi terhadap keputusan petani mengembangkan pola kemitraan petani plasma mandiri.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan kemitraan yang telah dilaksanakan menunjukkan adanya saling menguntungkan antara kedua belah pihak, tetapi ada juga yang belum sepenuhnya merasakan peningkatan pendapatan. Dalam penelitian ini yang berjudul Kajian Pelaksanaan Kemitraan Antara PT Mulia Raya Dengan Petani Pisang Ambon di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Kajian pelaksanaan kemitraan akan membahas sistem kemitraan yang telah dilaksanakan serta

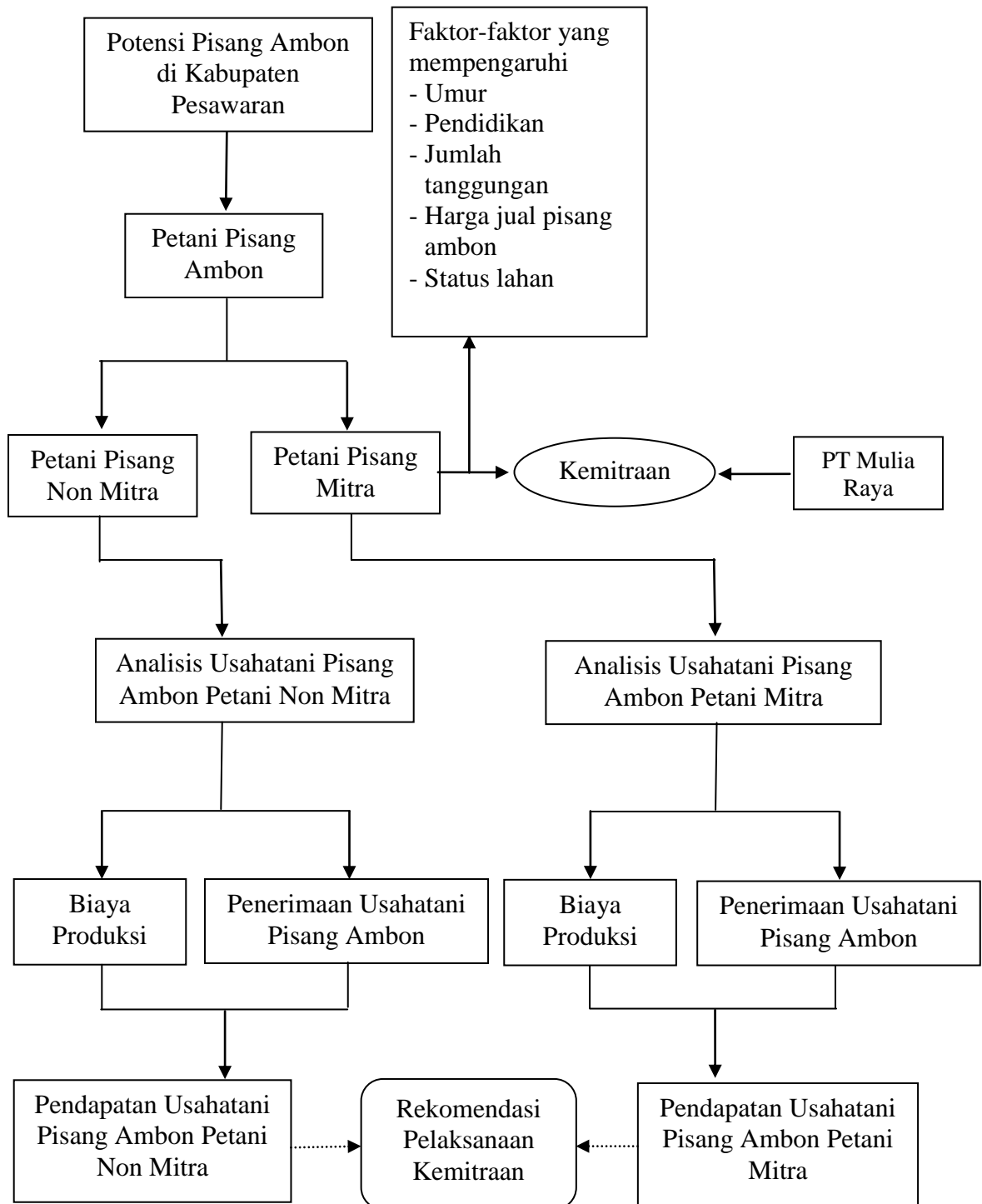
manfaat yang didapat dan kendala yang dihadapi oleh petani pisang maupun PT Mulia Raya secara deskriptif. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam melakukan kemitraan menggunakan Model Logit, mengetahui pengaruh kemitraan terhadap pendapatan usahatani pisang ambon dan mengetahui perbedaan pendapatan usahatani pisang ambon petani mitra dan non mitra menggunakan uji T-Test.

## **B. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini didasarkan pada potensi pisang yang cukup besar di Kabupaten Pesawaran dan peranan pisang sebagai sumber pendapatan dan penyedia lapangan kerja. Untuk itu pengembangan pisang di Kabupaten Pesawaran sangat diperlukan. Salah satu pengembangan pisang dengan melaksanakan kemitraan. Kemitraan merupakan suatu inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan menguntungkan bagi perusahaan.

Pada kenyataannya tidak semua petani pisang mau melaksanakan kemitraan, sehingga petani pisang dikelompokkan menjadi dua yaitu petani pisang mitra dan petani pisang non mitra. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi petani pisang melaksanakan kemitraan menurut peneliti terdahulu diantaranya adalah umur, jumlah anggota keluarga yang produktif bekerja di bidang pertanian, luas lahan (Rachmawati, 2008), harga benih, jumlah benih, total produksi, harga output, tenaga kerja luar keluarga (Puspitawati, 2004), pengalaman berusahatani, pendidikan, produktivitas (Marliana, 2008). Dalam penelitian ini peneliti menduga faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan

petani melakukan kemitraan adalah umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, status lahan, harga jual pisang ambon. Kerangka penelitian dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Kerangka Pemikiran Penelitian

### **C. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Diduga keputusan petani untuk mengikuti kemitraan dengan PT. Mulia Raya dipengaruhi oleh umur, pendidikan, jumlah anggota keluarga, harga komoditas, dan status lahan.
2. Diduga terdapat perbedaan antara pendapatan usahatani petani pisang ambon yang mengikuti kemitraan dan pendapatan usahatani petani pisang ambon yang tidak mengikuti kemitraan.